

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.1. Partisipasi Masyarakat

Pengertian masyarakat selalu dikaitkan dengan atau bersinonim dengan peran serta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta. suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta.

Menurut Dwiningrum, (2002:50) partisipasi adalah adalah melibatkan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, keterlibatan dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki, serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka partisipasi itu tidak hanya berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaan tetapi menangkut keterlibatan diri seseorang sehingga menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terhadap kelompok.

Defenisi mana yang dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan memasyarakatkan sistem pembangunan yang partisipasif. Dalam sosiologi defenisi pertama merupakan suatu bentuk mobilisasi lain dalam pembangunan, terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Adi dalam Mustari (2011:22) partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam empat tahap yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Tahap assesment

Dilakukan dengan mengidentifikasikan masalah dan sumber daya yang dimiliki, untuk ini masyarakat dilibatkan secara aktif melalui permasalahan yang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

2. Tahap alternative program dan kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternative program.

3. Tahap evaluasi (termasuk evaluasi input proses atau hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang telah dijalankan.

Dari beberapa definisi yang telah disebut diatas, maka dalam penelitian ini definisi partisipasi yang dimaksud oleh peneliti yakni, keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam pendanaan, perencanaan dan memberikan sumbangan ide terhadap proyek pembangunan yang akan dilaksanakan, dimana dalam hal ini masyarakat berfungsi sebagai sebagai subjek sekaligus objek pembangunan yang mengetahui betul kondisi di daerah sendiri. Sehingga perkembangan yang mereka harapkan betul-betul sesuai dengan dibutuhkan.

Menurut Soetomo (2009:294) dilihat dari prosesnya, partisipasi yang dianggap sesuai dengan pengembangan kapasitas masyarakat adalah partisipasi yang meliputi keseluruhan proses pembangunan, sejak dari identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan dalam menikmati hasil.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan konsep partisipasi ideal tersebut, bentuk partisipasi masyarakat dalam menyumbang ide perubahan dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi langkah awal yang sangat penting dan akan mempengaruhi langkah dan tahap berikutnya. Hal ini disebabkan karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mengakibatkan masyarakat merasa bahwa kegiatan tersebut menjadi miliknya. Dengan demikian, akan lebih menumbuhkan rasa tanggungjawab untuk ikut serta menentukan keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan, serta keterlibatan dalam memikul hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan (Josef Riwu Kaho, 2002: 114)

Menurut Yogi Supayogi Sugandi (2011: 184) Partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Midgley dalam Khairul Muluk (2007:51) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat disebut tercapai apabila program yang diinginkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara efektif terpelihara oleh masyarakat sendiri setelah semua dukungan eksternal berakhir.

Menurut Mubyarto (2000 :28) partisipasi masyarakat adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, Taliziduhu Ndraha (dalam Kunarjo 2002:63) dengan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab dukungan masyarakat adalah merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain:

1. Partisipasi dalam perencanaan, dimana masyarakat dilibatkan langsung oleh pemerintah untuk ikut serta dalam proses perencanaan pembangunan yang akan dilakukan di daerah tersebut. Kondisi ini semakin meningkatkan kepedulian masyarakat untuk mensukseskan pembangunan yang dilaksanakan.
2. Partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dimana masyarakat dilibatkan dalam kegiatan operasional program pembangunan yang dilaksanakan. Misalnya : membantu petugas memberikan informasi atau komunikasi.
3. Partisipasi dalam menerima hasil, dimana masyarakat diminta untuk memanfaatkan dan melestarikan hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan, sehingga hasil pembangunan tersebut dapat digunakan oleh beberapa generasi yang akan datang.

Menurut Wisnu Hidayat (2004:75) Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dapat dilihat dalam bentuk:

1. Uang, bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tenaga, partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program.
3. Pikiran-pikiran atau ide-ide, merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.

Dari pengertian diatas, jelaslah bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan diawali dengan keikutsertaan mereka untuk melibatkan diri dalam program pembangunan tersebut. Oleh karena itu pemerintah harus memberdayakan pembangunan yang partisipatif agar proqram-program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat berhasil.

### 2.2. Macam-Macam Partisipasi dalam Masyarakat

Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepekat sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Dimana ruang lingkupnya meliputi pertama menggerakkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sumber daya dan dana, kedua kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program;

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai;
4. Partisipasi dalam evaluasi, partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

### 2.3. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengetasan kemiskinan di era globalisasi sekarang ini. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Pemberdayaan (*empowerment*) konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang di inginkannya. Kemampuan tersebut untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok, terlepas dari kebutuhan, potensi dan keinginan orang lain.

Menurut parsons (1994 : 49) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Djhani, (2003 : 43) mendefenisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya atau kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(*powerless*) dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga menjadi keseimbangan.

Hal ini juga di ungkapkan oleh Rappaport (1984 : 49) secara jelas bahwa pemberdayaan merupakan suatu cara dengan masyarakat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai dan memahami serta berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan menekankan pada aspek pendelegasian atau pemberian kekuasaan dan memberi wewenang atau pengalihan kekuasaan pada individu, kelompok serta masyarakat yang mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan juga menekankan makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup sendiri.

Ife (1995 : 49) pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat didalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas itu sendiri.

Secara lebih rinci Slamet (2003 : 49) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.

Istilah mampu disini mengandung makna : berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, budaya dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat.

Indikator pemberdayaan menurut Soeharto (2011 : 50) paling tidak memiliki empat hal yaitu:

1. Kegiatan yang terencana dan kolektif.
2. Memperbaiki kehidupan masyarakat.
3. Prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, dan
4. Dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

Menurut Oos. M. Anwas (2003 : 58) pemberdayaan ditujukan agar klien atau sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupannya untuk berdaya, memiliki daya saing dan mandiri dalam pelaksanaan pemberdayaan, khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:

- a. Pemberdayaan dilakukan dengan cara yang demokratis dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan, masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Unsur-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan ciri pemberdayaan.
- b. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi dirinya. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan untuk mandiri.

- c. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan, oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan.
- d. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya dan kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dalam masyarakat. Budaya dan kearifan lokal seperti gotong royong, kerjasama, hormat kepada yang lebih tua, dan kearifan lokalnya sebagai jati masyarakat perlu tumbuh kembangkan melalui berbagai bentuk pemberdayaan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
- e. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari sifatnya sederhana menuju yang komplek.

Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut. Keberdayaan dalam konteks masyarakat merupakan individu berpartisipasi aktif dalam masyarakat baik itu secara fisik, mental dan juga manfaat yang diperoleh individu yang bersangkutan. Meskipun pemberdayaan masyarakat bukan semata-mata konsep ekonomi, tetapi seringkali ditujukan pada pengetasan kemiskinan, kesejahteraan masyarakat serta penyehatan lingkungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2.4. Pengertian Pokja AMPL dan Program PAMSIMAS

### 1. Pengertian pokja AMPL

Menurut website resmi dari cipta karya menyatakan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan disadari tidak hanya terkait pada satu aspek saja tetapi membutuhkan integrasi dari beberapa aspek, yakni teknis air minum dan sanitasi, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup. Berdasarkan pemahaman itulah maka dibentuk Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) di tingkat nasional.

Pada awal pembentukannya di tahun 1997, Pokja AMPL merupakan lembaga koordinasi yang dibentuk untuk mendampingi proyek WASPOLA (*Water and Environmental Sanitation Policy and Action Planning*). Proyek kerja sama antara pemerintah RI dan Bank Dunia ini bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan dan operasionalisasi kebijakan dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia. Dalam keberjalanannya, melihat bahwa pembangunan AMPL yang melibatkan berbagai sektor dan pihak. Peran pokja AMPL sebagai wadah koordinasi dan sinergi pembangunan AMPL menjadi semakin luas. Pokja AMPL Nasional tidak hanya menjadi sekedar sebagai lembaga koordinasi dalam pendampingan proyek namun juga sebagai sarana advokasi dan sosialisasi pembangunan AMPL di Indonesia. Instansi yang didukung dan menjalin kerjasama pada akhirnya tidak terbatas pada kalangan pemerintah saja, namun juga meliputi Program/proyek AMPL lainnya (SANIMAS, ProAir,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PAMSIMAS, CWSHP, WSLIIC, STBM, PPSP, dll), LSM/NGO (PLAN, UNICEF, SIMAVI, BORDA), lembaga donor, lembaga akademis dan sebagainya.

Salah satu pencapaian penting dari keberadaan kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan adalah tersusunnya kebijakan nasional air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat (AMPL BM) dan konsep kebijakan nasional air minum dan penyehatan berbasis lembaga. Kebijakan Nasional AMPL BM terdiri dari 11 prinsip pembangunan AMPL BM yang dalam lima tahun terakhir telah dioperasionalisasikan dan diterapkan melalui berbagai program/ proyek AMPL yang ada di Indonesia.

2. Pengertian program PAMSIMAS

Program PAMSIMAS merupakan salah satu program AMPL-BM (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di Indonesia, program PAMSIMAS adalah aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan.

PAMSIMAS adalah suatu program penyediaan air minum, sanitasi dan kesehatan. Pamsimas dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan apabila berbasis pada masyarakat dengan melibatkan seluruh masyarakat baik perempuan maupun laki-laki, baik yang kaya maupun yang miskin,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dilakukan melalui pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Proyek tanggap terhadap kebutuhan masyarakat tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam menyiapkan, melaksanakan, mengoperasionalkan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan.

Program pamsimas ini adalah salah satu program pemerintah pusat dalam pembangunan yang masuk ke desa-desa untuk menyelesaikan segala permasalahan yang berhubungan dengan air dan lingkungan yang berbasis masyarakat. Program ini hadir tentu dengan tujuan awalnya adalah untuk membantu masyarakat di desa dalam berbagai kebutuhan air untuk aktivitas kehidupan sehari-harinya serta kesehatan lingkungan tempat mereka tinggal. Program ini memang tidak hanya untuk desa tertinggal, tetapi untuk semua desa yang memang membutuhkan sarana air ataupun kekurangan akses air di desa mereka, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Ruang lingkup kegiatan Program PAMSIMAS mencakup 5 (lima) komponen proyek yaitu :

- 1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan Lokal;
- 2) Peningkatan Kesehatan dan Perilaku Higienis dan Pelayanan Sanitasi;
- 3) Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Umum;
- 4) Insentif untuk Desa / kelurahan dan Kabupaten / Kota; dan
- 5) Dukungan Pelaksanaan dan Manajemen Proyek.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan program pamsimas adalah untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan dan masyarakat urban, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup sehat dengan membangun / menyediakan sarana dan prasarana air minum serta sanitasi berbasis masyarakat berkelanjutan dan mampu diadaptasi oleh masyarakat. Secara lebih rinci program pamsimas bertujuan untuk:

1. Meningkatkan praktik hidup sehat dan bersih di masyarakat;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan;
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal (pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat;
4. Meningkatkan efektifitas dan kesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam Tugas dan Fungsi MITRA yang terlibat program PAMSIMAS dapat dipahami sebagai berikut :

1. Badan perencanaan dan pembangunan nasional bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi terhadap perencanaan yang dilakukan oleh sektor terkait.
2. Departemen pekerjaan umum Direktur jendral Cipta Karyaditunjuk sebagai penanggung jawab proyek PAMSIMAS secara teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keseluruhan dan melakukan pembinaan yang berkaitan dengan konstruksi sarana yang dibangun.

3. Departemen kesehatan Direktur Jendral PP(Pemberantasan penyakit) dan PL (Penyehatan Lingkungan) melakukan pembinaan teknis terhadap program pengawasan kualitas air dan lingkungan serta penyuluhan kesehatan.
4. Departemen dalam Negeri Direktur jendral pengembangan daerah bertanggung jawab pembinaan koordinasi pelaksanaan di daerah. Direktur jendral PMB (Pengembangan Masyarakat dan desa) bertanggung jawab dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat.
5. Departemen keuangan Direktur Jendral anggaran bertanggung jawab dalam pembinaan kebijakan penganggaran dana pinjaman, dana hibah, dan dana pendamping.

3. Pengertian Air

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Fungsi air bagi kehidupan tidak dapat digantikan oleh senyawa lain. Penggunaan air yang utama dan sangat vital bagi kehidupan adalah sebagai air minum. Hal ini terutama untuk mencukupi kebutuhan air di dalam tubuh manusia itu sendiri. Kehilangan air untuk 15% dari berat badan dapat mengakibatkan kematian yang diakibatkan oleh dehidrasi. Karenanya orang dewasa perlu minum minimal sebanyak 1,5 – 2 liter air sehari untuk keseimbangan dalam tubuh dan membantu proses metabolisme (Slamet, 2007). Di dalam tubuh

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, air diperlukan untuk transportasi zat-zat makanan dalam bentuk larutan dan melarutkan berbagai jenis zat yang diperlukan oleh tubuh. Misalnya untuk melarutkan oksigen sebelum memasuki pembuluh-pembuluh darah yang ada disekitar alveoli(Mulia, 2005)

Pemanfaatan air untuk berbagai keperluan adalah:

1. Untuk keperluan air minum
2. Untuk kebutuhan rumah tangga I (cuci pakaian, cuci alat dapur, dan lain-lain)
3. Untuk kebutuhan rumah tangga II (gelontor, siram-siram halaman)
4. Untuk konservasi sumber baku PAM
5. Taman rekreasi (tempat-tempat pemandian, tempat cuci tangan)
6. Pusat perbelanjaan (khususnya untuk kebutuhan yang dikaitkan dengan proses kegiatan bahan-bahan/ minuman, WC dan lain-lain)
7. Perindustrian (untuk bahan baku yang langsung dikaitkan dalam proses membuat makanan, minuman seperti teh botol, coca coal, perusahaan roti dan lain-lain)
8. Pertanian/ irigasi
9. Perikanan.

## **2.5.Tahapan Kegiatan Program Pamsimas**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran program diatas serta menjamin kelancaran komponen-komponen program pamsimas, dibutuhkan langkah-langkah pelaksanaan program, yang mencakup:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Persiapan awal program dari tingkat pusat sampai tingkat masyarakat (desa),
- b. Penentuan provinsi dan kabupaten/kota sasaran,
- c. Sosialisasi program tingkat pusat sampai tingkat desa,
- d. Seleksi dan penentuan desa/kelurahan sasaran,
- e. Pelaksanaan program di tingkat desa, kegiatan persiapan dan pengkondisian masyarakat, pendampingan masyarakat, Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat dan persiapan dana masyarakat dalam DIPA,
- f. Pendampingan peningkatan kapasitas pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam rangka pencapaian target MDGs, melalui pelaksanaan kegiatan replikasi dengan pendekatan PAMSIMAS,
- g. Strategi pencapaian “outcome” dan tujuan program pada daerah sasaran,
- h. Monitoring partisipatif dan “outcome”, serta studi penilaian dampak program untuk mengetahui efektifitas, efisiensi serta perubahan perilaku masyarakat.

Teknis pelaksanaan program PAMSIMAS ini terdiri dari tiga bagian,

yaitu:

1. Proses pemilihan lokasi pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana suatu lokasi dipilih untuk mengikuti proyek PAMSIMAS, sehingga sejak awal dapat dikatakan bahwa prakarsa/inisiatif proyek berasal dari masyarakat. Urutan kegiatan sebelum suatu lokasi dapat dipilih untuk ikut serta dalam program PAMSIMAS, yaitu: Sosialisasi proyek ditingkat Kabupaten Sosialisasi proyek ditingkat desa/kelurahan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan minat masyarakat penetapan desa/ kelurahan sebagai lokasi proyek.

2. Proses perencanaan dan implementasi proyek di masyarakat pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana suatu lokasi yang telah terpilih untuk ikut serta dalam proyek PAMSIMAS melakukan kegiatannya mulai dari tahap perencanaan yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat, serta tahap implementasinya.
3. Pengelolaan sarana air, sanitasi, dan program kesehatan oleh masyarakat, pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana desa/ kelurahan melaksanakan kegiatan-kegiatan pada tahap pasca proyek. Ketiga bagian diatas adalah kegiatan yang saling berkaitan, dimana setelah dilakukan pemilihan lokasi kemudian dilakukan proses perencanaan dan implementasi proyek yang bersangkutan, sampai memasuki tahap akhir proyek.

Dalam pelaksanaan program PAMSIMAS, didapatkan melalui sumber dana kredit IDA (International Development Association) No. Cr. 420-IND, Rupiah Murni Pendamping dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, dan Dana Kontribusi Masyarakat.

## **2.6.Landasan Hukum Program Pamsimas**

Kebijakan dan perangkat peraturan sebagai bingkai untuk pengembangan desa dalam pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan dan penyehatan lingkungan, ditunjang oleh semua pihak dari Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, baik itu ditingkat I atau Pemerintah Daerah tingkat II dan Pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pusat serta dukungan dari organisasi dunia yang terkait tentang pemberdayaan masyarakat dan penyehatan lingkungan pedesaan. Untuk mewujudkan program tersebut diperlukan landasan dari undang-undang maupun peraturan dari pemerintah. Kebijakan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
2. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
4. PP No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
5. PP No. 72 dan 73 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan
6. PP No. 7 Tahun 2004 Tentang RPJMN Renstra 2004-2009 yaitu Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Minum dan Sanitasi yang berkelanjutan
7. Surat Edaran Bersama MENEG Perenc. Pemb. Nas./Kepala Bappenas dan MENDAGRI No. 1181/M.Ppn/02/2006 dan 050/224/Sj Tanggal 14 Feb 2006 Perihal Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2006.
8. Surat Mendagri No. 414.2/2435/Sj Tanggal 21 September 2005 Perihal Pedoman Umum Pengelolaan Pembangunan Partisipatif.

#### 2.7.Faktor Penghambat atau Kendala

Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan dapat menghentikan suatu kegiatan. Kendala dalam penanggulangan pelaksanaan program PAMSIMAS yang dihadapi selama pelaksanaan program PAMSIMAS,

- yaitu: pada aspek perencanaan dan penjadwalan kegiatan kadang sulit dapat diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Pada aspek pelaksanaan, kebiasaan atau perilaku masyarakat dan petugas yang kurang disiplin mengikuti petunjuk pelaksanaan program PAMSIMAS. Penanganan masalah yang dapat dilakukan adalah memberikan saran kepada pihak yang berwenang dan berkompeten sebagai tindak lanjut penanganan masalah. Seperti, untuk jadwal yang tidak dapat diikuti oleh semua pihak terlibat, agar kembali dilakukan penjadwalan ulang sehingga semua pihak yang terlibat dapat hadir. Untuk kebiasaan masyarakat yang kurang disiplin, dapat dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat. Jika masyarakat tidak disiplin maka program PAMSIMAS yang telah disepakati untuk dicapai bersama tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan prinsip program PAMSIMAS yang berbasis masyarakat yaitu seluruh proses perencanaan PAMSIMAS seperti pemilihan kebutuhan air dan pelaksanaan kegiatan menyertakan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat atas sarana air minum dan sanitasi, sehingga diharapkan sarana yang terbangun dipelihara dan dikelola oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Foster (1967 : 56), bahwasanya hambatan utama dalam pengembangan dan pembangunan adalah cara pola pikir masyarakat dimana keuntungan yang diperoleh seseorang merupakan kerugian bagi orang lain, sehingga mereka menarik diri serta tidak ingin menggunakan peluang-peluang baru karna ia takut mengakibatkan ketidaktentraman secara sosio ekonomi yang meningkat, selain itu akan melahirkan konflik antar sesama.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Michel P.Todaro (2002 : 523) menafsirkan bahwa kendala-kendala dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada di masyarakat adalah :

1. Populasi manusia yang selalu meningkat yang tidak diimbangi oleh sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Kemiskinan yang tidak sesuai dengan lingkungan hidup (ketimpangan sosial).
3. Pertumbuhan ekonomi dan industri yang tidak di barengi dengan upaya kelestarian hidup.
4. Pembangunan daerah pedesaan dalam sektor pangan yang merupakan tanggung jawab negara tersebut.
5. Upaya pemerintahan diperkotaan yang tidak menyesuaikan dengan lingkungan hidup dan populasi penduduk. Dan
6. Faktor lingkungan alam dan hidup secara global.

## **2.8. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelitian terdahulu dengan judul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kamparoleh Jamzi Mordani (2014). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa, fasilitator Pamsimas dan masyarakat dalam upaya pemberdayaan Program Pamsimas dan tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam upaya pemberdayaan masyarakat mengenai program ini. Adapun hasil



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari penelitian ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dilakukan oleh pemerintah desa, fasilitator Pamsimas dan masyarakat adalah cukup mampu diberdayakan, hanya program sanitasi di tempat-tempat umum hasilnya belum maksimal di lakukan dalam pemberdayaan masyarakat, manfaat dari Program Pamsimas sudah dirasakan masyarakat melalui depot air minum Pamsimas yang beroperasi setiap hari dan menjadi konsumsi air di masyarakat desa kampung panjang.

Selanjutnya penelitian dari Muhammad Jaka Permana (2016) dengan Judul Pelaksanaan Pengelolaan Air Di Bawah Tanah Melalui Program Pamsimas Di Tinjau Dari Keputusan Menteri Nomor 1451 K/10/Mem/2000 Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengelolaan Air Di Bawah Tanah Melalui Program Pamsimas Di Tinjau Dari Keputusan Menteri Nomor 1451 K/10/Mem/2000 Di Desa Geringging Baru Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan program ini tidak efektif dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat, hal ini dapat dilihat kurangnya keinginan masyarakat untuk melakukan perawatan, pemeliharaan serta pemantauan dan pengawasan terhadap Program Pamsimas.

Beata Ratnawati(2012) Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Kabupaten Batang. Universitas diponegoro.denganmenggunakan analisa SWOT. Hasil penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Sodong lebih besar dibanding masyarakat di Desa Mojotenga. Hal ini dibuktikan mulai dengan kerjasama masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan program.

Kemudian penelitian dari Dwi Haryanti (2015) dengan judul Pengaruh Peran Kepala Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Desa Sungai Guntung Tengah Kecamatan Rengat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di desa sungai guntung tengah kecamatan rengat.

Terakhir penelitian dari Nurannisya (2017) dengan judul Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Sungai Pinang Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Riau. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian penulis adalah partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa sungai pinang dikatakan rendah. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor pendidikan dan pekerjaan.

Dari lima penelitian terdahulu tersebut yang memiliki topik yang sama yaitu tentang Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan penulis teliti. Dimana penulis ingin mengetahui Partisipasi Masyarakat Dalam Melestarikan Program

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.

## 2.9. Pandangan Islam tentang Air dan Sanitasi

Air, selain merupakan kebutuhan pokok manusia, juga merupakan sarana utama untuk kebersihan dan kesucian. Dalam kehidupan sehari-hari, air amat diperlukan untuk bersuci, mencuci, mandi, memasak dan minum, sehingga dapat dikatakan bahwa air merupakan kebutuhan pokok manusia. Sebegitu pentingnya air bagi kehidupan manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa air adalah kehidupan itu sendiri. Orang yang mencemari sumber air, mengotori air dan membuat polusi terhadap air berarti merusak kehidupan itu sendiri. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar:21

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal”. (Az-Zumar:21)

## 2.10. Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan batasan pengertian terhadap faktor variabel yang diperkirakan dalam objek penelitian, supaya tidak terjadi salah pengertian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan definisi konsep yang digunakan :

1. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan, keterlibatan dapat berupa mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki, serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan.
2. Pemberdayaan adalah proses pembangunan sumber daya manusia atau masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya.
3. Pokja AMPL adalah suatu bentuk program kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan yang bertujuan untuk memfasilitasi penyusunan dan operasionalisasi kebijakan dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia.
4. Program PAMSIMAS adalah salah satu program AMPL-BM (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat) di Indonesia yang merupakan aksi nyata dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan dukungan Bank Dunia, untuk meningkatkan penyediaan air minum, sanitasi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya yang ditularkan melalui air dan lingkungan.
5. Landasan hukum adalah peraturan atau hukum yang menjadi dasar/mendasari dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan adanya landasan hukum suatu kegiatan yg dilaksanakan harus berdasarkan hukum/peraturan yg berlaku sehingga terciptalah ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan dapat menghentikan suatu kegiatan.

## 2.11. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan penulis dalam menentukan indikator-indikator penelitian. Sejalan dengan permasalahan yang telah di uraikan sebelumnya dengan mengutip beberapa teori maka untuk mempermudah analisa serta agar terdapat satu pengertian agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dan istilah yang digunakan dalam analisis sebelumnya, maka konsep tersebut akan di operasionalkan.

Adapun konsep operasional yang penulis kemukakan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, yaitu:

**Tabel 2.1 : Variabel Penelitian**

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Partisipasi Masyarakat dalam program Pamsimas	1. Perencanaan Program	a. Pemilihan kebutuhan air dan teknologi b. Menentukan mekanisme pendanaan c. Pembentukan organisasi pengelola
	2. Pengawasan dan peninjauan	a. Melakukan pengawasan secara berkala b. Melakukan peninjauan terhadap program c. Mengikuti pendampingan program
	3. Pemeliharaan dan perbaikan sarana program	a. Melaksanakan pemeliharaan rutin terhadap sarana program b. Melakukan perbaikan sarana program secara kebersamaan
	4. Pemanfaatan program	a. Pemanfaatan untuk keberlanjutan b. Melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana program

Sumber : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran bertujuan untuk menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator yang mempengaruhinya, dilandasi oleh konsep maupun teori-teori yang di anggap relevan.

Setelah memahami bagaimana konsep-konsep yang berhubungan atau berkaitan dengan Partisipasi masyarakat dalam melestarikan Program pemberdayaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Kampung Panjang, maka penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

